



Manajemen Pembiayaan Pendidikan : Analisis Pendanaan dan Pembelajaran di Sekolah SMP IT Al-Hijrah Deli Serdang

Muhammad Fuad Zaini¹, Zaini Sahara², Seroja Sulis³

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

² Universitas Amir Hamzah

³ STAI Jam'iyah Mahmudiyah

Corresponding Author: ✉ fuadzaini06@gmail.com

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pendaan dalam lembaga pendidikan menjadi hal yang paling sulit untuk dilakukan dan dikendalikan jika tidak adanya tehnik-tehnik dalam penyaluran keseluruhan bidang. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitati dengan pendekatan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah seorang kepala sekolah sebagai pemimpin dilembaga pendidikan tersebut, harus lebih memperhatikan atas segala sesuatu yang mencakup dan maupun system pembelajaran. Karena keduanya saling memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang satunya. Peran guru serta staf juga tidak dapat dilepaskan, diharapkan adanya kontribusi-kontribusi yang diberikan sebagai penunjang lancarnya segala harapan dan keinginan dari lembaga pendidikan tersebut. Sehingga harapan-harapan tidak hanya angin belaka, harus mencari sumber-sumber permasalahan jika terjadi suatu konflik tentan pembiayaan. Walaupun bersih dari yang dinamakan korupsi. Namun, jika pengaplikasian selalu tidak tepat pada sasarannya Akan mengakibatkan kemerosotan pada lembaga pendidikan tersesbtu, karena hanya memanfaatkan apa yang ada serta yang lebih parahnya menerima apa adanya.

Kata Kunci Keywords

Pembiayaan, Korupsi, Pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal utama yang harus dimiliki oleh setiap bangsa untuk mencapai kemajuan. Kualitas pendidikan masyarakat yang baik, tentunya akan memberikan efek positif bsgi kemajuan bangsa dan negaranya. Pendidikan memiliki banyak aspek yang harus dikelola secara baik dan benar. Diantaranya seperti Konsep Dasar Administrasi, Manajemen Kesiswaan, Manajemen membiayaan, Sarana Prasarana, dan lain-lain.

Oleh karena itu perlu adanya manajemen yang baik dalam dunia pendidikan. Salah satu yang menjadi aspek utama dalam manajemen pendidikan ialah konsep dasar dalam mengelola pembiayaan pendidikan. Hal

ini perlu mendapat kajian tersendiri mengingat hal tersebut merupakan komponen yang sangat penting dan paling menentukan keberhasilan setiap usaha pendidikan.

Dana merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi manajemen berbasis sekolah, yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan.

Kami mengambil inisiatif melakukan riset (observasi) ke sekolah SMP IT AL-HIJRAH yang berada di Deli Serdang, untuk mengetahui bagaimana system pendaan dan pembelajaran di Lembaga Pendidikan tersebut. Diharapkan dengan melakukan observasi tersebut, dapat menambah ilmu dan pengetahuan yang kami.

Untuk itu Kami menyajikan hasil observasi kepada pembaca guna pemberian informasi bahwasanya observasi yang kami lakukan di Lembaga Pendidikan tersebut diharapkan bermanfaat bagi pembaca, menambah wawasan, dan lain sebagainya. Kritik dan saran dari pembaca sangat kami perlukan guna penyempurnaan observasi yang kami lakukan, dan juga untuk memberikan bantuan ilmu pengetahuan kepada Lembaga Pendidikan tersebut guna meningkatkan Kuantitas serta Kualitas siswa yang ada disekolah tersebut.

Dasar Hukum Pembiayaan Pendidikan

Sebuah lembaga pendidikan yang sukses tidak lepas dari sokongan biaya pendidikan yang tinggi pula, karena pada hakikatnya mutu pendidikan akan berbanding lurus dengan biaya pendidikan yang dikeluarkan, semakin tinggi dan mahal biaya pendidikan yang digunakan dan dikeluarkan maka semakin baik pula layanan pendidikan tersebut dan mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang bermutu dengan hasil belajar yang tinggi. Sepertinya akan sulit merealisasikan mutu pendidikan yang baik apabila tidak didukung oleh biaya pendidikan yang tinggi pula.

Biaya pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam sektor lembaga pendidikan seperti sekolah, baik sekolah yang dikelola oleh pemerintah (sekolah Negeri) dan juga sekolah yang dikelola oleh masyarakat sendiri (sekolah swasta) yang dikelola oleh yayasan atau badan penyelenggara pendidikan tertentu. Biaya-biaya pendidikan yang berputar dan dipergunakan harus terkelola dan tercatat dengan baik sehingga biaya pendidikan tersebut dapat mengefisienkan dan mengefektifkan proses pembelajaran di sekolah dan dan pelbagai program-program sekolah.

Untuk lebih memahami bagaimana sebenarnya manajemen pembiayaan pendidikan dalam lembaga pendidikan ditingkat persekolahan maka dari tulisan

ini mencoba menjelaskan secara singkat segala hal yang berkaitan dengan manajemen pembiayaan pendidikan, namun tidak menghilangkan substansinya. Dari hal yang akan dijelaskan dalam tulisan kali ini adalah (1) perencanaan anggaran pendidikan, (2) pelaksanaan anggaran pendidikan, (3) penatausahaan keuangan pendidikan, (4) pengawasan anggaran pendidikan, dan (5) pertanggungjawaban keuangan pendidikan (Mulyasa, 2002).

Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Amandemen IV) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia

Secara khusus disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD.

Dalam UU Nomor 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Bahkan warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Demikian pula warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus (Tilaar, 1992).

METODE PENELITIAN

Menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang prosedur penemuannya dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantitatif. Dalam hal ini penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kehidupan, cerita, perilaku seseorang, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik. Metode penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Studi kasus (Case Study) adalah studi yang dilakukan secara insentif, rinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau fenomena tertentu. Menurut Nasution, studi kasus adalah suatu bentuk penelitian yang dapat dilakukan terhadap individu, sekelompok individu, kelompok manusia (guru, suku), lingkungan manusia (desa), atau lembaga sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan-Kebijakan Pembiayaan Pendidikan

1. Perencanaan Anggaran Pendidikan

Dalam sebuah manajemen apapun selalu pelaksanaannya diawali dengan perencanaan, pun begitu dengan bidang pendidikan yang berkaitan dengan penganggaran. Untuk dapat menyusun anggaran pendidikan yang tepat para administrator dan manajer pendidikan harus mengerti dan memahami segala hal yang berkaitan dengan sistem penganggaran yang berlaku di suatu Negara. Di antara sistem yang ada adalah *Line Item Budgeting* (LIB), *Capital Budgeting* (CAB), *Performance Budgeting* (PEB), dan *Zero Based Budgeting* (ZBB).

LIB adalah sistem penganggaran yang menitik beratkan pada jenis barang yang diperlukan. Pengalokasian barangnya pun disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan misalnya; komputer, kursi-meja, 12 lusin ATK, 3 LCD proyektor, dan 6 Lemari guru dan lain-lainnya. Sedangkan *CAB* adalah sistem penganggaran yang menitik beratkan pada jangka waktu yang lama, dalam *CAB* ini anggaran diperhitungkan untuk jumlah anggaran yang diperlukan untuk perencanaan jangka panjang. Misalnya; rencana jangka panjang adalah membangun 15 lokal kelas, merehabilitasi gedung sekolah, membangun 10 ruang laboratorium, dan membangun 25 gedung perpustakaan.

Sumber dana Selain dari pemerintah yang disebut dengan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), sekolah tersebut mendapatkan dana dari siswa yaitu pada saat pendaftaran yang digelar satu kali setahun, dan juga pembayaran SPP/bulannya. Dana awal untuk masuk kesekolah tersebut adalah sebesar Rp. 3.500.000. dana juga didapat dari orang tua siswa yang sukarela memberikan bantuan kepada sekolah. Sumber dana tidak terlalu banyak mengambil dari pihak-pihak lain, kerja sama dengan stakeholder juga tidak ada. Hanya saja sedang dilakukan usaha untuk menembus sebuah dana dari sejenis stakeholder yang tidak disebutkan nama dan alamat stakeholder tersebut. Mungkin karena masih dalam proses, baik dalam perencanaan atau sedang berlanjut.

PEB sendiri adalah sistem penganggaran pendidikan yang menitik beratkan pada jenis barang yang diperlukan dalam jangka waktu yang lebih lama lagi dan juga dikategorikan dengan keluaran. Maka dari hal itu pengeluaran ini harus ditulis secara ketat yang berkaitan dengan perumusan tujuan umum maupun tujuan khusus. Sedangkan yang dimaksud dengan ZBB adalah sistem penganggaran pendidikan yang berorientasi pada keterbatasan sumber dana. Karena dana terbatas maka dalam melakukan pengalokasian anggaran harus ada penajaman prioritas baik mengenai program, kegiatan, maupun sasaran yang ingin dicapai (Fattah, 2007).

2. Pelaksanaan Anggaran Pendidikan

Mekanisme pembiayaan pendidikan sekolah negeri di Indonesia mengalami perubahan seiring dengan pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Saat ini aliran dana dari pusat ke daerah dilakukan melalui mekanisme dan perimbangan, khususnya melalui dana alokasi umum (DAU) yang bersifat block grant. Melalui alokasi ini pemda lebih memiliki kepastian tentang waktu dan jumlah dana yang diterimanya.

Dari sisi pembelanjaan, pemda juga mempunyai keleluasaan dalam merencanakan anggarannya, sehingga dapat mengalokasikan anggaran sesuai prioritas pembangunan didaerahnya. Menurut UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, selain DAU, dana perimbangan yang diterima daerah adalah dana bagi hasil dan dana alokasi khusus (DAK). Sumber penerimaan daerah lainnya adalah pendapatan asli daerah (PAD), pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD (Undang-Undang RI, 2003).

Selain melalui mekanisme dana perimbangan, alokasi dana pusat ke daerah juga dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pemerintah provinsi selain melaksanakan tugas desentralisasi, sekaligus juga melaksanakan tugas dekonsentrasi yang secara operasional dilakukan oleh dinas (teknis) provinsi. Anggaran pelaksanaan dekonsentrasi merupakan bagian dari APBN yang disalurkan melalui gubernur oleh departemen/lembaga pemerintah non-departemen terkait. Anggaran tugas pembantuan sama dengan anggaran dekonsentrasi, tetapi dapat disalurkan baik ke provinsi maupun kabupaten/kota, bahkan langsung ke desa. Pertanggungjawaban penggunaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan langsung kepada pemerintah pusat melalui departemen/lembaga pemerintah non-departemen yang menugaskan. Administrasi penggunaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dipisahkan dari administrasi penggunaan dana desentralisasi.

3. Penatausahaan Anggaran Pendidikan

Penatausahaan keuangan pendidikan adalah kegiatan pencatatan transaksi keluar masuknya uang yang digunakan untuk membiayai program pendidikan dengan maksud agar diperoleh informasi tentang pengelolaan anggaran pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini perlu diperhatikan dengan baik, karena hal ini sangat berguna dalam rangka pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengguna anggaran pendidikan.

Dalam hal penatausahaan anggaran pendidikan setidaknya ada dua hal penting yang harus dilakukan yaitu; pendataan dan pelaporan keuangan pendidikan, dan pembukuan pelaksanaan anggaran pendidikan.

Dalam kegiatan pendataan ini meliputi indentifikasi dan pengukuran data keuangan, pencatatan dan pengklasifiasian data keuangan, dan melakukan pelaporan keuangan kepada pihak pengguna. Untuk mengidentifikasi data keuangan pendidikan dilakukan secara mendetil dan ditulis secara kronologis dan sistematis selama satu periode tertentu di dalam sebuah buku atau jurnal. Setiap pencatatan harus didukung dengan sejumlah faktur, kwitansi, dan nota yang sesuai dan telah disahkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan itu.

4. Pengawasan Anggaran Pendidikan

Dalam sebuah manajemen manapun tidak akan pernah lepas dengan pengawasan atau yang kita kenal dengan *controlling*. Secara istilah pengawasan ini bermakna suatu kegiatan melihat, memerhatikan, memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan pelaksanaan dari sebuah program yang telah dicanangkan untuk melihat ketercapaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam kaitannya dengan pengawasan penggunaan dana pendidikan dapat diartikan dengan memperhatikan, melihat, menilai, dan melaporkan penggunaan anggaran pendidikan yang telah dialokasikan untuk membiayai program-program pendidikan agar anggaran yang dialokasikan tersebut digunakan sesuai dengan semestinya, dan program pendidikan dapat berjalan secara baik, efisien, dan efektif.

5. Pertanggungjawaban Keuangan Pendidikan

Dalam pengolahan keuangan pendidikan tidak akan terlepas dari pembuatan pertanggungjawaban keuangan pendidikan, yang dimaksud dengan pertanggungjawaban keuangan pendidikan adalah aktivitas membuat laporan keuangan dari kegiatan pengelolaan keuangan pendidikan yang disusun setelah semua bukti pengeluaran diuji kebenarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan disajikan untuk atasan langsung bendaharawan atau untuk instansi yang terkait.

Kegiatan pertanggungjawaban keuangan pendidikan dilakukan dengan mengecek keabsahan bukti pengeluaran, keabsahan itu harus memiliki komponen berikut; nama instansi, nama yang berhak menerima pembayaran, uraian pembayaran, jumlah uang yang dibayar, tahun anggaran dan mata anggaran, bea materai temple.

Analisis Pembiayaan Pendidikan

Dari argumentasi yang diberikan oleh narasumber kepada kami, masih banyaknya harapan-harpan yang belum dapat terpenuhi. Realitanya didalam lembaga pendidikan tersebut masih belum memenuhi kriteri-kriteria serta harapan yang diinginkan. Masih perlunya mengadakan evaluasi mengenai system pendanaan, sehingga harapan tidak sekedar angan-angan saja.

Sarana prasarna juga masih belum mendekati kata puas, karena hanya sarana yang menjadi proses pembelajaran saja yang terlihat jelas, namun prasarana seperti taman-taman tidak ada ditemukan, halaman terlihat gersang dan tandus. Disamping itu infrastruktur sisa pembangunan masih terlihat jelas.

1. Program-program pembiayaan

a. Pengembangan SDM tenaga pendidikan

Pengembangan SDM tenaga pendidikan terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas mengajar maupun kedisiplinan dalam melakukan pembelajaran, berdasarkan dari hasil pernyataan yang kami peroleh, bahwasanya setiap guru yang hendak masuk ke kelas harus membawa RPP (Rencana Pendidikan Pembelajaran). Dan juga tepat waktu, jam 7.00 harus sudah sampai ke lingkungan sekolah serta mengikuti apel pagi. Setelah itu masuk ke kelas tepat jam 7.10,

b. Pengembangan SDM tenaga kependidikan

Sama halnya dengan pengembangan SDM tenaga pendidik, peraturan-peraturan yang telah ditetapkan harus dijalankan dengan baik, walaupun tenaga kependidikan tidak kontak langsung dengan pembelajaran yang terjadi.

c. Fasilitas pendidikan

Fasilitas sarana prasarana pendidikan sudah cukup lengkap, hanya saja ada beberapa fitur atau perlengkapan yang harus dilakukan pengadaan, siswa duduk 1 kursi/orang, mushola ada, sekaligus tempat murid-murid melakukan shlat duha serta mentahfiz al-qur'an

2. Ketercapaian Program

Program-program yang telah disusun sedemikian rupa masih belum menunjukkan hasil yang maksimal, salah satunya adalah belum adanya prestasi yang diukir dari hafalan Tahfiz tersebut. Serta sudah berjalankah program guru yang setiap akan memasuki kelas membawa RPP, ini menjadi tanda Tanya besar. Karena dalam prosesnya kami tidak melihat hal demikian.

3. Pengelolaan Pembiayaan

Beberapa poin yang membuat penilai kami terfokus kepada kebijakan yang dilakukan, dana BOS yang didapat dari pemerintah, berdasarkan pernyataan yang kami dapat bahwasanya sebahagian dari dana tersebut digunakan untuk membantu para siswa. Seperti bantuan siswa yang telah berstatus Yatim, kurang mampu.

4. Solusi dalam menghadapi persoalan pembiayaan

Ada banyak sekali persoalan dalam pendaan pendidikan, baik dari segi mendapatkan dana begitu juga ketika melakukan penyaluran dana. Untuk itu sebagai seorang pemimpin harus melakukan perencanaan sebelum menyalurkan dana, agar tidak terjadi ketidak tepat sasaran. Jika persoalan-persoalan timbul harus dihadapi dengan penuh tanggung jawab, baik itu berdampak kerugian bagi lembaga pendidikan pada akhirnya. Namun itu semua pasti ada jalan keluar, meninjau kembali dan selalu menlakukan pengawasan secara berkesinambungan. Agar kesalahan-kesalah yang sudah lewat tidak terulang lagi.

KESIMPULAN

Pendaan dalam lembaga pendidikan menjadi hal yang paling sulit untuk dilakukan dan dikendalikan jika tidak adanya tehnik-tehnik dalam penyaluran keseluruhan bidang. Walaupun bersih dari yang dinamakan korupsi. Namun, jika pengaplikasian selalu tidak tepat pada sarannya Akan mengakibatkan kemerosotan pada lembaga pendidikan tersebut, karena hanya memanfaatkan apa yang ada serta yang lebih parahnya menerima apa adanya. Untuk itu seorang kepala sekolah sebagai pemimpin dilembaga pendidikan tersebut, harus lebih memperhatikan atas segala sesuatu yang mencakup dan maupun system pembelajaran. Karena keduanya saling memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang satunya. Peran guru serta staf juga tidak dapat dilepaskan, diharapkan adanya kontribusi-kontribusi yang diberikan sebagai penunjang lancarnya segala harapan dan keinginan dari lembaga pendidikan tersebut. Sehingga harapan-harapan tidak hanya angin belaka, harus mencari sumber-sumber permasalahan jika terjadi suatu konflik tentang pembiayaan

REFERENCES

- Banurea, O. K. (2017). Peran Pendidikan Agama Islam (Proses Pembelajaran) Bagi Anak Penyandang Autis di Sekolah Inklusi SD IT Zahira School Medan. *ANSIRU PAI : Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam,*

- 1(2), 20-37.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/ansiru.v1i2.1507>
- Fadhli, M. (2019). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah dan Komitmen Guru Terhadap Efektifitas Madrasah di Lhokseumawe. *Jurnal Iqra' : Kajian Ilmu Pendidikan*, 4(1), 56-70. <https://doi.org/10.25217/ji.v4i1.447>
- Fadhli, M. (2020). Sistem Penjaminan Mutu Internal Dan Ekstenal Pada Lembaga Pendidikan Tinggi. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 53-65. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v4i2.1148>
- Mulyasa, Enco. 2002. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Wijaya, David.2009. *Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan*. *Jurnal Pendidikan Penabur – No.13/Tahun ke-8/Desember 200*.
- Tilaar. 1992. *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fattah, Nanang (2007). *Analisis kebijakan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar*. Bandung : Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bandung : Fokus Media.
- Zaini, M. F., & Syafaruddin, S. (2020). The Leadership Behavior of Madrasah Principals in Improving the Quality of Education in MAN 3 Medan. *Jurnal Iqra' : Kajian Ilmu Pendidikan*, 5(2), 95-106. <https://doi.org/10.25217/ji.v5i2.649>
- Zaini, M. F., Hidayat, R., Fadhli, M., & Pasaribu, M. H. (2020). Manajemen Mutu Pendidikan: Perspektif Al-Qur'an dan Tafsir. *Education Achievement: Journal of Science and Research*, 1(1).